

BEST PRACTICES IMPLEMENTASI
INISIATIF PENCEGAHAN KEKERASAN (IPK)/
PREVENTING VIOLENCE EXTRIMISM (PVE) DI SEKOLAH
MELALUI PROGRAM SEKOLAH DAMAI
(BEST PRACTICES DI TIGA SEKOLAH DI TANGERANG SELATAN/TANGSEL)

A. Pendahuluan: Proses Ideologisasi Disekolah

Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas menjelaskan bahwa di Indonesia pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Walau pada masa Orde Lama, pendidikan agama menjadi pilihan. Dalam proses pembelajaran agama di sekolah, pendidikan agama diajarkan kepada siswa yang seagama dan tidak diikuti oleh siswa dari yang berbeda agama. Sehingga struktur kurikulum pendidikan agama di Indonesia (khususnya Pendidikan Agama Islam) berkaitan dengan aspek Tauhid yang bersifat doktrinasi terkait ke-Esaan Allah, Fiqih terkait tata cara ibadah, Akhlak terkait penguatan budi pekerti, Al-Quran (al-Hadits) terkait membaca, menulis dan menghayati kandungan kitab suci Al-Quran dan aspek sejarah.

Pada Kurikulum 2013, kesemua aspek tersebut tercakup dan didorong kepada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Sementara aspek spiritual dan sosial seperti yang telah dijelaskan dalam bab lain dalam disertasi ini tidak diajarkan secara langsung namun di biasakan. Pembelajaran PAI di kelas lebih banyak pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Sehingga, basis spiritual (Kompetensi Inti 1) dan basis sosial-ideologis (Kompetensi Inti 2) tidak kuat diajarkan. Guru PAI cenderung mengajarkan pengetahuan sesuai dengan pemahamannya.

Pembelajaran PAI di kelas haruslah melihat kepada tiga hal. Pertama bagaimana belajar tentang beragama (*teaching into religion*). Kedua bagaimana belajar mengerti beragama (*teaching about religion*) dan ketiga bagaimana belajar untuk agama (*teaching for religion*). Terkait pembelajaran Pendidikan Agama di sekolah, di Indonesia menekankan kepada pemahaman agama siswa menjadi lebih kuat. Dengan tujuan siswa memiliki aqidah agama yang mapan dan kuat sesuai dengan madzhab atau aliran agama yang ada. Pandangan monolitik dalam pembelajaran agama di sekolah ini mengakibatkan siswa tidak diberikan informasi dalam pembelajaran agama terkait pandangan lain dalam beragama. Siswa tidak mengenal sistem kepercayaan (aqidah atau tauhid atau ritual ibadah dari agama atau kepercayaan atau sekte atau paham lain), selain paham yang diajarkan gurunya.

Pendidikan agama seharusnya menjadi jangkar ideologis dalam menguatkan pemahaman keagamaan yang benar kepada siswa dengan tetap mengembangkan sikap toleran terhadap pemahaman lain. Di Indonesia, negara memiliki kepentingan besar dengan pendidikan agama. Dengan pendidikan agama diharapkan generasi Indonesia memiliki landasan spiritual dan religius yang kuat dan mapan. Dan tetap memiliki rasa kebangsaan dan kecintaan kepada ke-Indonesiaannya.

Pemahaman terhadap pihak lain dengan sikap toleran tersebut sejalan dengan paradigma Pendidikan Islam yang *humanis theosentris*. Paradigma *Humanisme Theosentris* dalam pendidikan Islam yang dimaksudkan di sini adalah sebuah model praktik pendidikan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu pendidikan yang menekankan pengembangan potensi manusia supaya mampu memerankan fungsi kemanusiaannya sebagai *abdun* dan *khalifah Allah* dalam rangka membantu subyek didik mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya secara utuh sehingga

menjadi manusia mandiri, kreatif, dan sadar akan hakikat dirinya dan kehadiran Tuhan dalam jiwanya.¹

Penelitian PPIM (Pusat Pengembangan Islam dan Masyarakat) UIN Syarif Hidayatullah mengkonfirmasi bahwa peran pendidikan agama dalam penguatan wawasan keberagaman yang moderat mendapat tantangan dari model pembelajaran agama di luar kelas.² Adanya pemahaman yang eksklusif siswa berdasarkan penelitian PPIM tersebut berasal dari luar kelas. Trans nasional ideologi mencoba masuk dan mencari pengikut dari kalangan siswa. Dan mereka berhasil. Pandangan eksklusif dan tekstualis dalam menjalankan agama saat ini mempengaruhi kalangan muda dan siswa.

Dalam Kurikulum 2013 khususnya pada Kompetensi Inti (KI) 1 dan KI 2 memiliki muatan teologis dan ideologis. Muatan teologis pada KI 1 berkaitan dengan bagaimana semua mata pelajaran mampu menguatkan nilai-nilai, pratek dan pemahaman serta penghayatan keagamaan siswa. Sebab KI satu langsung dengan tegas menyebutkan implementasi dari “menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya”. Jelas ini menandakan pentingnya penguatan pelaksanaan agama siswa. Argumentasi ini menjadi landasan teologis dari KI 1 yang sejalan dan menjadi implementasi dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada KI 2 berkaitan dengan landasan ideologis yang menjadi basis argumentasi implementasi sikap sosial yang harus ditanamkan kepada siswa. KI 2 ini menegaskan sikap yang ingin dimiliki dan dibiasakan yang kemudian menjadi karakter yaitu sikap “menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong-royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya). Jelas disini menunjukkan KI 2 berkaitan dengan landasan ideologis untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam semua proses pembelajaran pada semua mata pelajaran.

Ada tantangan nyata Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dalam menguatkan landasan spiritual yang moderat dan landasan ideologis yang menguatkan ideologi Pancasila. Tantangan tersebut datang dari maraknya ideologi keagamaan yang berkembang di sekolah umum. Dari wacana di atas, kita bisa melihat bahwa pendidikan memiliki muatan ideologis. Muatan ideologis tersebut dibawa oleh lembaga Pendidikan atau penyelenggara Pendidikan baik negeri maupun swasta. Atau justru muatan ideologis tersebut datang dari luar sekolah. Diakui, terjadi “kontestasi” ideologis di sekolah melalui Pendidikan Agama Islam. Termasuk ideologi radikal teroris menjadi bagian yang ikut berkontestasi di sekolah.

Pada konteks negara, pemerintah memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap muatan ideologis dalam Pendidikan tersebut. Walau pun faktanya, muatan ideologis Pancasila dalam pendidikan tidak berjalan dengan maksimal. Muatan ideologi Pancasila memang termaktub dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namun faktanya ideologisasi Pancasila dalam mata pelajaran PPKn tidak begitu terasa dan tidak kuat tertancap dalam, dalam alam pikiran, dan perilaku siswa yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Berbeda dengan ideologi keagamaan yang ditanamkan oleh lembaga pendidikan swasta, mampu menghasilkan keyakinan akan nilai-nilai ideologis yang ditanamkan.

Sebut saja lembaga pendidikan yang di kelola oleh Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah yang mengembangkan ideologi aswaja (NU) atau kemuhammadiyah. Kebetulan materi aswaja atau kemuhammadiyah tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Namun ada beberapa lembaga pendidikan yang mengembangkan ideologi

keagamaan tersendiri. Sekolah/madrasah menjadi *marketing ideology*³ bagi pengelolanya, dimana pesan-pesan ideologis ditanamkan dan diinterpretasikan serta di artikulaskan dalam proses pendidikan.

Dapat ditarik benang merah bahwa **ideologi keagamaan dalam pendidikan adalah nilai-nilai keagamaan tertentu yang dikembangkan melalui pendidikan dengan maksud untuk membentuk frame atau cara berpikir untuk menguatkan corak berpikir keagamaan, bersikap dan berperilaku, sesuai dengan ideologi pengelola sebagai alat legitimasi atas eksistensi pengeloa atau penguasa.**⁴ Ideologi keagamaan ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat dukungan dari kader atau *apparatus ideology*⁵ sekaligus sebagai basis gerakan sosial dan politik.

Ekstensifikasi dan sekaligus diversifikasi ideologi tertentu melalui pendidikan ini bertujuan untuk menguatkan pembentukan identitas kelompok⁶, *manhaj* atau cara berpikir kelompok, dan kepentingan gerakan politik kelompok. Persinggungan tersebut (ideologi keagamaan, pendidikan dan kepentingan politik) menurut Michael W Appel disebut sebagai *official knowledge*. Yaitu pengetahuan terkait ideologi tertentu menjadi legitimasi kepentingan tertentu atau *knowledge as legitimate*.⁷ Pengetahuan yang dikembangkan melalui lembaga pendidikan adalah untuk mendukung dan menguatkan ideologi penyelenggara.

Sekolah-sekolah yang dikembangkan oleh masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki ideologi keagamaan ini, memanfaatkan *structural opportunity*⁸ yang diberikan negara dengan mengembangkan dan membangun sekolah formal. Sekolah formal yang mereka bangun dengan mengadopsi kurikulum nasional namun tetap dengan mengedepankan penanaman ideologi keagamaan -yang sesuai dengan pengelola, melalui *hidden* kurikulumnya. Strategi ini digunakan menurut Charlene Tan sebagai bagian dari **penguatan membangun kader di masa depan terutama dalam mengimplementasikan shari'ah Islam di Indonesia**. Ini artinya lembaga pendidikan menjadi sarana yang strategis untuk menguasai lebih luas peri kehidupan berbangsa, bernegara dan berpolitik dari ideologi tertentu di masa depan.⁹

Sebagai sebuah teks, sekolah memberikan sumber, bahan dan proses pembelajaran yang sesuai dengan ideologi tertentu. Dimana proses pembelajaran tersebut akan mengendap dan tertanam dalam kuat dalam alam pikiran siswa. Penguatan sumber pengetahuan yang terkait doktrin ideologi ini kemudian disebut oleh Michael W. Apple sebagai *knowledge as legitimate*,¹⁰ pengetahuan sebagai sumber legitimasi bagi kepentingan ideologi tertentu. Sekolah sebagai konteks adalah dimana sekolah menjadi *social setting* atau *culture framing* bagi ideologi tertentu. Sekolah sekaligus menjadi transmisi bagi penyebaran ideologi tertentu. Penguatan basis pengetahuan ini digunakan oleh kelompok berideologi radikal teroris untuk melahirkan kader yang oleh Althusser disebut sebagai *apparatus ideology*. Istilah *apparatus* yang dimaksud oleh Althusser adalah segala aspek sosial, ekonomi, individu, masyarakat atau struktur sosial lainnya yang bisa menjadi bagian dari objek dan sekaligus subjek penguatan ideologi.¹¹

Sekolah sekali lagi menjadi transmisi bagi pengembangan, penguatan dan menciptakan *apparatus* atau kader bagi ideologi tertentu. Pengembangan dan penguatan ideologi tertentu yang sesuai dengan pengelola lembaga sekolah tersebut, dilakukan tidak hanya dalam kurikulum saja. Penguatan pada bahan ajar di sekolah-sekolah yang dikelola kelompok ini juga menggunakan bahan ajar yang berafiliasi kepada ideologi pengelola.¹²

Program Inisiatif Pencegahann Kekerasan (IPK) atau *Preventing Violence Extrimisme* yang dikerjakan AGPAII bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), dimaksudkan

untuk membentengi sekolah dan aktor lokal agar tidak terbawa paham ideologi radikal ekstrimisme, paham eksklusif dalam pandangan beragama. Sekaligus menguatkan aktor lokal sekolah untuk menjaga paham inklusif berkembang di lingkungan sekolah. Selain itu program ini juga memberikan alternatif narasi dalam melawan narasi thoghut, khilafah, ekstrimisme, kekerasan berbasis agama, hoaxes, dan menguatkan narasi dan wacana ideologi Pancasila, kebangsaan, moderasi beragama, dan menguatkan isu-isu perdamaian di ruang publik.

Inilah yang menjadi salah satu alasan, program Inisiatif Pencegahan Kekerasan (IPK) atau implementasi Preventing Violence Ekstremisme (PVE) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) yang dilaksanakan tiga sekolah di Tangerang Selatan,- SMKN 3, SMK Al-Mubarak dan SMAN 6, sebagai *pilot project*, di Kota Tangerang Selatan. Program ini berlangsung selama 20 bulan dengan dukungan dari The Asia Foundation (TAF).

B. Sekolah Sasaran

1. Lima siswa (anggota Rohani Islam/Rohis) dan dua orang GPAI dari SMAN 6 Tangerang Selatan
2. Lima siswa (anggota Rohani Islam/Rohis) dan dua orang GPAI dari SMKN 3 Tangerang Selatan
3. Lima siswa (anggota Rohani Islam/Rohis) dan dua orang GPAI dari SMK Al-Mubarak Tangerang Selatan

C. Tahapan Pelaksanaan Program

1. Assasment

Kegiatan Pertama: Assasment Kerentanan

Kegiatan pertama ini dimaksudkan untuk mengetahui kerentanan yang terjadi. Tujuan dari assasment adalah AGPAII mampu memetakan kerentanan yang terjadi, memetakan aktor lokal di sekolah sasaran. Assasment ini juga ingin mengetahui kebutuhan sekolah sasaran terkait penguatan aktor lokal serta “media” yang tepat untuk melakukan penguatan di sekolah sasaran.

Assasment yang dilakukan AGPAII dilakukan dua kali. Pertama, tanggal 5 – 15 Februari 2019 dengan menyebarkan angket kuisisioner untuk 300 siswa dan 15 orang Guru dari 15 SMA dan SMK yang ada di Tangsel. Hasil assasment awal ini dipresentasikan pada FGD pada tanggal 16 Februari 2019 yang dihadiri oleh beberapa GPAI dari Tangsel. Dan dari pihak TAF serta AGPAII sebagai penyelenggara. Hasil FGD awal ini merekomendasikan agar AGPAII mempertajam assasment sesuai dengan petunjuk teknis assasment yang telah diberika TAF.

Tujuan dari assasment awal ini untuk mengetahui kerentanan di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam assasment awal ini adalah menggunakan penyebaran kuisisioner. Dimana isu atau pertanyaan yang ada dalam kuisisioner tersebut berkaitan dengan persepsi responden terkait pandangan terhadap ideologi Pancasila, pandangan terhadap kelompok yang berbeda atau toleransi, pandangan terkait khilafah, penerapan Syariah Islam dan kondisi kerentanan yang ada di sekolah serta kegiatan keagamaan yang ada di sekolah.

Assasment kedua dilakukan dari tanggal 25 Februari 2019 – 6 Maret 2019. Assasment ke dua ini dengan metode wawancara langsung kepada lima GPAI dan 10 orang siswa dari lima SMA dan SMK yang telah ditunjuk. Responden Assasment

1. SMAN 2 Tangsel
2. SMAN 6 Tangsel
3. SMAN 8 Tangsel
4. SMKN 3 Tangsel
5. SMA Al-Mubarak Tangsel

Responden dari masing-masing sekolah tersebut adalah satu orang Guru Pendidikan Agama Islam dan 25 orang siswa-siswi pengurus ROHIS. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap lima sekolah SMA dan SMK di Tangerang Selatan (SMA AL-Mubarak, SMAN 6, SMKN 3, SMAN 2, dan SMK 8) ada beberapa temuan situasi makro di Tangerang Selatan:

- a. Penolakan atau pengusiran bikhu di Tangerang pada tanggal 4 Februari 2018 (detik.com)
- b. Penangkapan terduga teroris (liputan6.com, tribunenews.com, megapolitan.kompas.com)
- c. Isu sara imbas pilkada DKI
- d. Massa Reuni Akbar 212 asal Tangsel sebanyak 7.000 orang (Tribunenews.com, 2 Desember 2018).



Airin Sebut Tangsel Zona Merah Paham Radikal : Okezone News
Kalau Tangsel kan memang termasuk zona merah untuk radikalism
tapi kita terus berusaha terus lakukan pendekatan - Megapolitan
news.okezone.com

<https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2016/11/02/338/1531429/airin-sebut-tangsel-zona-merah-paham-radikal>

Buya: " Anakku...pelajaran apa yg kau dapat kemarin waktu reuni 212 di Monas?"
Anakku: " Belajar Sabar, Belajar Saling Bantu, Belajar Tenggang Rasa, anak Islam harus kuat, anak Islam harus berani, anak Islam harus Bela al-Quran dan anak Islam harus Bela Tauhid !!!"
Biar Topi ini yg jadi saksinya...Buya !



Abinya Fikri
9 Mar pukul 20:43 · 🌐

Shalat tetap wajib, tak berubah hukumnya sekalipun ada yang mengingkarinya.

Riba selamanya haram meskipun ada manusia yang menghalalkannya.

#KhilafahAjaranIslam & hukumnya fardhu kifayah walau seluruh manusia sepakat menolaknya.

Masfur Sidik
12 Jan pukul 00:19 · 🌐

Hati2 Dgn Kelompok Yg Anti Perda Syari'ah, Anti Poligami dan Sok paling Jujur. Boleh jadi mereka adalah "Pihak Ketiga" antara Cebong dan Kampret yg ingin supaya Negeri ini menjadi tinggal kenangan. **#PemiluDamaiTanpaPihakKetiga**

👍❤️ 22 7 Komentar

👍 Suka 💬 Komentar ➦ Bagikan

Dari hasil dua kali asesment kondisi kerentanan di sekolah dapat disimpulkan bahwa kerentanan yang terjadi adalah pemahaman keagamaan yang eksklusif dan kecenderungan memandang system Islam perlu dilaksanakan. Selain itu perspektif terhadap mengucapkan "natal" kepada saudara yang Kristiani masih dianggap salah dan tidak dibenarkan agama. Potensi kerentanan yang juga terlihat dari materi yang disukai oleh siswa adalah terkait materi "hijrah" dimana pemahaman terhadap definis "hijrah" bisa disesuaikan dengan kepentingan kelompok tertentu.

Kerentanan tersebut disebabkan kebiasaan dan perilaku responden dalam mencari informasi terkait agama melalui media sosial dan internet. Responden sangat familiar dengan situs-situs yang menyajikan terkait kajian agama (fiqih, Tauhid, Akhlak, Hijrah dan lainnya) seperti "era muslim, hidayatullah, VOI Voice of Islam dan situs lainnya.

Penetrasi juga datang dari Yayasan Al-Kahfi yang masuk ke sekolah untuk menggarap atau memberikan penguatan kajian ke-Islaman melalui organisasi ROHIS. Yayasan ini bahkan telah memiliki kesepakatan dengan pihak terkait untuk memberikan mentoring ROHIS di sekolah-sekolah. Media yang digunakan oleh kelompok penetrasi radikal teroris atau paham intoleran terbanyak menggunakan media sosial dan internet (website) serta masuk langsung ke sekolah dalam kegiatan mentoring baik di dalam sekolah maupun di

luar sekolah. Penetrasi melalui media dan terjun langsung ke sekolah seperti yang dilakukan Al-Kahfi ini mulai memberikan pengaruh terhadap pemahaman keagamaan siswa dan perspektif terhadap syariat islam serta relasi dengan pemeluk agama lain.

Berikut adalah faktor-faktor kerentanan yang terjadi di sekolah di Tangerang Selatan:

- 1) Faktor yang menyebabkan komunitas rentan terhadap ide dan aksi radikalisme
 - a) Mudahnya mendapatkan akses informasi mengenai agama melalui media social;
 - b) Penggunaan Media Sosial yang kurang bertanggung jawab;
 - c) Merebaknya kajian keagamaan di luar sekolah
 - d) Lemahnya pengawasan sekolah terhadap aktivitas siswa
 - e) Pemahaman keagamaan yang rendah dan literal

- 2) Penetrasi kelompok tertentu untuk penyebaran ide tertentu Al-Kahfi dan pengajian di luar jam sekolah/di luar sekolah

- 3) Kelompok yang melakukan penetrasi
Kelompok yang melakukan penetrasi merupakan senior ataupun alumni dari Rohis.

- 4) Media Penetrasi
Media yang digunakan untuk penetrasi adalah media sosial, dan liqo

- 5) Ruang / saluran penetrasi
Liqo-Liqo dan Kajian keislaman di luar sekolah

- 6) Anggota warga/kelompok yang terpapar dan indikasinya
Anggota ROhis yang haus pengetahuan keagamaan rentan terpapar paham radikal dan intoleran

No	Sekolah	Guru/Siswa	Penetrasi Lingkungan	Kebutuhan	Keterangan
1	SMKN 3	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman yang eksklusif - Belum ada kontra narasi dan siswa dan sekolah - Belum ada pencegahan - Mading belum di isi dengan literasi damai - Sumber informasi keagamaan banyak berasal dari media sosial yang mengarah kepada intoleransi - Belum bersedia mengucapkan selamat natal - Setuju dengan hukum Islam berlaku di Indonesia - Ada siswa yang tidak mau mengikuti pelajaran PPKN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masuk melalui media on line, hoaxes, hate speech dan paham keagamaan radikal teroris - Masuknya kelompok Al-Kahfi ke sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Materi ke Rohisan - Buku-buku literasi Keislaman - Web dan madding on line 	
2	SMAN 2	<ul style="list-style-type: none"> - Belum bersedia mengucapkan selamat natal - Tidak setuju dengan khilafah, namun setuju penerapan hukum Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> Penetrasi dari Al Kahfi ke sekolah Media sosial Berita hoaxes 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan literasi madding yang ada di sekolah 	

3	SMAN 6	<ul style="list-style-type: none"> - Media sosial menjadi salah satu pintu masuk pemahaman intoleran - Ada siswa yang tidak mau solat Jumat karena dianggap tidak sesuai dengan pemahannya 	Kajian keagamaan yang dilakukan di luar sekolah melalui liqo dan pengajian Al-Quran	Penguatan literasi damai	
4	SMAN 8	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkultusan terhadap sosok ulama/habaib - Keharusan melaksanakan maulid nabi sebagai ibadah 	Pengajian di luar sekolah	Penguatan Literasi dan Mading di sekolah	
5	SMA Al-Mubarak	Materi hijrah dan ukhuwah Islamiyah lebih disukai siswa System nilai dikalangan siswa lebih cenderung ke nilai Islam tekstual	Web atau media islam yang berisi terkait hijrah lebih banyak diminati siswa	Penguatan web atau madding sekolah	

2. Pendekatan Program

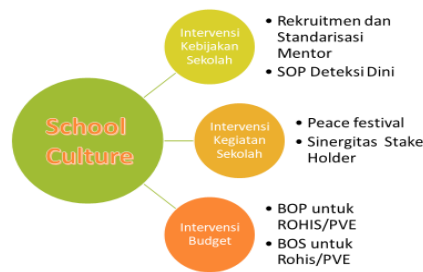
Pendekatan pertama program ini melalui model pendekatan *networking* atau jaringan. AGPAII melakukan pendekatan melalui aktor kunci: Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan anggota Rohani Islam (ROHIS) sebagai jaringan AGPAII. GPAI di sekolah menjadi aktor kunci untuk masuknya program Sekolah Damai ke sekolah sasaran. GPAI di sekolah sasaran kemudian mengkomunikasikan rencana program Sekolah Damai ke Kepala Sekolah dan sekaligus merekrut anggota Rohis yang dianggap potensial untuk terlibat dalam program.

Pendekatan ke dua melalui *strukturnal approach* Yaitu menggunakan pendekatan struktural birokrasi yang ada di Tangerang Selatan: Kepala Cabang Dinas (KCD) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan Pengawas Sekolah Tangerang Selatan. Pendekatan struktural dimaksudkan agar KCD mendukung program yang dilaksanakan di sekolah sasaran.

Pendekatan yang ke tiga adalah partisipatif, dimana aktor kunci sebagai sasaran program yaitu GPAI dan siswa dari tiga sekolah dilibatkan dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan. Model pendekatan partisipatif ini dimaksudkan untuk memperkuat *awarness* atau rasa memiliki dari aktor kunci terhadap program yang sedang dilaksanakan.

3. Strategi Pelaksanaan Program

Strategi program yang diterapkan adalah melalui model pendekatan *school culture*, *class room culture* dan kegiatan siswa. *School culture* menyoal bagaimana pelibatan kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan utama disekolah terkoneksi dan mendukung program. Sementara untuk *class room culture*, dimana sasaran utamanya adalah guru, menguatkan program pembelajaran di kelas yang diampu oleh Guru PAI. Dan ketiga adalah kegiatan siswa yaitu melalui penguatan kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam (ROHIS) atau Tohani Kristen (Rokris) dan OSIS.



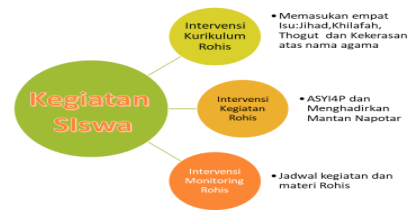
Strategi penguatan budaya sekolah dilakukan dengan mendorong kepala sekolah sebagai *decision maker* membuat kebijakan terkait perwujudan dan implementasi Sekolah Damai melalui berbagai kebijakannya. Dimana kebijakan tersebut menyangkut hal-hal terkait implementasi program sekolah damai, serta pengelolaan interaksi semua warga sekolah tanpa diskriminasi. Pengelolaan pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, penguatan suasana sekolah yang damai, penguatan pembiasaan, pengelolaan kegiatan siswa yang mendorong interaksi positif dan aktif untuk membangun penghargaan, saling menghormati dan mencegah paham radikal teroris serta mewujudkan suasana sekolah yang harmoni.

Sasaran strategis yang dimaksud adalah pembuatan kebijakan Sekolah Damai melalui berbagai pengelolaan suasana sekolah, tampilan sekolah, interaksi antar warga sekolah serta quote damai yang ada di sekolah, *peace corner*, pojok damai. Termasuk pengelolaan Osis (Organisasi Intra Sekolah) dan Rohis (Rohani Islam/Rohani keagamaan siswa lainnya) . Serta dukungan pendanaan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Strategi *school culture* mengarahkan agar kepala sekolah terlibat aktif dalam mewujudkan nilai-nilai damai melalui pembuatan kebijakan dan program sekolah yang berkesinambungan. Titik perubahan yang dapat di lihat dari program budaya sekolah yang dibuat kepala sekolah adalah adanya dokumen kebijakan sekolah yang mengembangkan implementasi nilai-nilai damai. Seperti pengelolaan kegiatan yang tidak diskriminasi dan memberikan akses pelibatan kepada semua warga sekolah tanpa diskriminatif, suasana sekolah yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila. Konkrit dari strategi *school culture* adalah adanya perencanaan kegiatan yang telah disepakati sekolah (kepala sekolah) dengan AGPAII. Kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk *memorandum of understanding* (MoU) antara AGPAII dan sekolah.



Sementara *classroom culture* atau budaya kelas yaitu penguatan damai yang berbasis nilai *Islam Rahmatan lil Alamin* atau ISRA di kelas melalui pembelajaran PAI. Hal ini meliputi bagaimana Guru PAI menyiapkan materi pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai ISRA. Nilai-nilai ISRA dielaborasi dan dieksplorasi dalam semua proses pembelajaran PAI. Selain itu menanamkan penghargaan terhadap perbedaan, menguatkan nilai-nilai *Islam rahmatan li al-'alamin* serta menghadirkannya di kelas. Budaya kelas juga bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran PAI yang lebih terbuka, inklusif, toleran, menghadirkan perbedaan di dalam kelas baik dalam wacana, pendapat, paham, agama, golongan atau keyakinan untuk dihargai dan di hormati serta didiskusikan dalam kerangka mewujudkan pemahaman dan kesaling pengertian. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan kelas PAI yang lebih variatif, suasana kelas yang menunjukkan penguatan isu-isu perdamaian dan penghargaan terhadap perbedaan serta menjelaskan “bahaya” empat isu: thoghut, khilafah, kekerasan atas nama agama dan khilafah. Seperti adanya *quote* damai di kelas, pengelolaan kerja kelompok yang heterogen, perjumpaan dengan orang yang berbeda melalui program *live in* internal kelas atau lainnya. Penghargaan terhadap perbedaan, interaksi yang tanpa diskriminasi/bully, menguatkan nilai-nilai *wasyatiah*, nasionalisme, mengukuhkan sikap toleran dan anti paham radikal terorisme serta menguatkan ideologi Pancasila.



Strategi ke tiga yaitu mengintervensi kegiatan siswa, khususnya kegiatan Rohani Islam (Rohis). Intervensi ini dilakukan dengan mengembangkan kurikulum Rohis dan sistem mentoring Rohis. Selain itu dalam kegiatan Rohis didorong untuk mengembangkan wawasan yang lebih inklusif, dan mengembangkan kemampuan untuk membangun wacana dan narasi inklusif melalui berbagai platform media baik *on line* maupun *off line*. Khususnya terkait kontra narasi empat isu: thoghut, jihad, kekerasan atas nama agama dan khilafah.

Intervensi kegiatan Rohis ini diwadahi dalam sebuah program *Academy of Show Your Ideas for Peace* atau ASYI4P. Program ASYI4P ini menjadi daya pendorong kreatifitas anggota Rohis dari tiga sekolah untuk mengembangkan ide-ide inklusif dan mengembangkan kontra narasi empat isu di atas.

4. Model pendampingan

Keberhasilan program ini salah satunya dengan intensifnya pendampingan terhadap GPAI dan 15 siswa yang menjadi sasaran program. Pendampingan yang dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi intensif dan diskusi-diskusi informal dalam mengembangkan gagasan kreatif terkait kegiatan kontra narasi empat isu. Pendampingan dilakukan dengan mendiskusikan rencana program yang akan dilaksanakan sesuai dengan target program dan kebutuhan dilapangan.

D. Intervensi Program

Intervensi program dilakukan dengan mengintegrasikan program yang telah direncanakan pihak sekolah/GPAI dan Rohis di sekolah sasaran. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan kadang dilakukan secara bersama-sama dan atau di sekolah masing-masing.

1. Intervensi kurikulum (Khususnya Kurikulum Rohis)

Academy Show Your Idea's for Peace



Intervensi pertama adalah intervensi kurikulum Rohis di tiga sekolah. Intervensi ini dilakukan secara langsung dengan menggandeng anggota Rohis dalam kegiatan pengembangan wawasan dan kreativitas anggota Rohis. Intervensi kurikulum ini dengan memasukkan materi empat isu: thoghut, jihad, kekerasan atas nama agama dan khilafah dalam kegiatan mentoring Rohis di tiga sekolah sasaran. Selain itu, intervensi juga dilakukan dengan mengembangkan pendidikan dan latihan (diklat) mentor Rohis yang didukung oleh KCD Pendidikan Kota Tangerang Selatan.



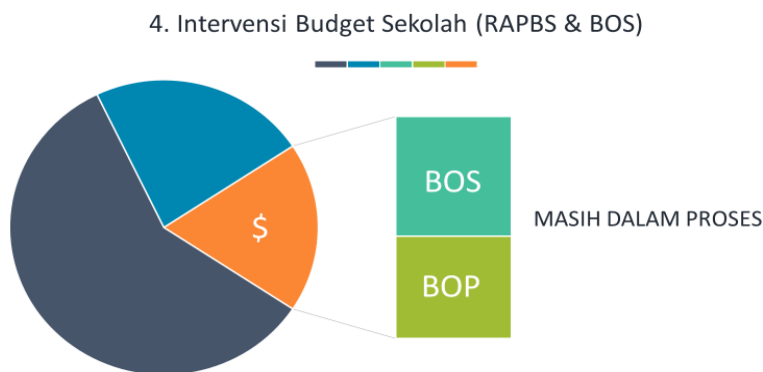
Intervensi yang kedua adalah intervensi program sekolah. Khususnya untuk program Rohis. Intervensi program sekolah ini dilakukan dengan menawarkan berbagai kegiatan yang mengembangkan kreativitas siswa dan melibatkan semua siswa dari tiga sekolah sasaran. Sekaligus dengan mengembangkan jaringan anggota Rohis se Kota Tangsel dalam Forum Silaturahmi Rohis se-Kota Tangsel. Kegiatan yang dimaksud adalah peace festival pelajar se-Kota Tangsel yang menghasilkan produk quote dan tulisan damai Pelajar SMA dan SMK se Kota Tangsel serta *peace corner* di tiga sekolah sasaran.

Untuk menguatkan empat isu, AGPAII menghadirkan mantan teroris Sofyan Tsuauri. Kehadiran Sofyan Tsauri sangat memberikan pengaruh besar terhadap perubahan

pemahaman dan sikap anggota Rohis terkait empat isu. Selain itu, kehadiran Sofyan Tsuari memberikan dampak besar terhadap anggota Rohis dan kepala sekolah di tiga sekolah sasaran terkait bahaya paham radikal teroris dan pentingnya upaya pencegahan paham radikal teroris.

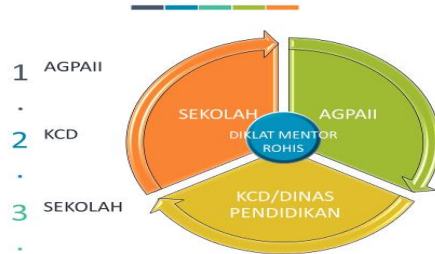


Intervensi ke tiga adalah intervensi kebijakan kepala sekolah. Kepala sekolah didorong untuk membuat kebijakan yang mendukung sekolah damai. Kebijakan yang dimaksud adalah mengintegrasikan program sekolah damai dalam program sekolah, seperti pengelolaan dan rekrutmen Rohis yang terstandar dan penguatan monitoring kegiatan Rohis. Termasuk dukungan keterlibatan mantan teroris untuk memberikan pemahaman kepada para siswa.



Intervensi yang keempat adalah mendorong kepala sekolah untuk mengalokasikan dana sekolah (BOS, bantuan operasional sekolah) untuk program sekolah. Salah satunya dalam dukungan dana untuk pengelolaan Rohis dan kegiatan keagamaan sekolah yang mendorong implementasi program sekolah damai.

5. SINERGITAS STAKE HOLDER



Intervensi yang kelima adalah mensinergikan pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah dari tiga sekolah, kepala cabang dinas (KCD) pendidikan Kota Tangsel dan AGPAII untuk memiliki kesamaan visi dalam mengimplementasikan program. Sinergitas tiga unsur ini dimaksudkan agar program bisa terus berlanjut (kesinambungan program) walau program telah selesai.

E. Kendala Pelaksanaan Program

Kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan program:

1. Diawal program, AGPAII memahami program IPK sebagai program toleransi. Namun kemudian, seiring pendampingan dari *program officer* TAF, AGPAII bisa berjalan.
2. Kepala sekolah pada awalnya tidak terlalu tertarik dengan program sehingga menyerahkan semua kegiatan program kepada GPAI.
3. MoU yang telah disetujui bersama dengan AGPAII tidak terlaksana semua, terutama dalam pengembangan *school culture*.
4. Pemahaman yang keliru tentang sekolah damai, dimana sekolah yang sasaran “merasa” bukan sekolah damai. Selain itu ada beberapa guru di sekolah sasaran yang memiliki persepsi bahwa sekolah damai yang ditawarkan AGPAII akan membawa toleransi yang “kebablasan” dengan program kunjungan ke tempat ibadah agama lain.
5. Keterlibatan Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang slow respon terhadap program sekolah damai.

¹ M.Nasir Budiman, Paradigma Humanisme Theosentris Dalam Pendidikan Islam, Dimensi Metodologis Pembelajaran, Ar-Raniry Press, Aceh 2012, 5

² PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Potret Guru Agama: Pandangan Tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan*, Jakarta-PPIM, 2018. Baca juga Convey Report: Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam, PPIM UIN Jakarta-UNDP Indonesia, Vol 1 No 9 Tahun 2019.

³ Zeus Leonardo, *Ideology, Discourse, and School Reform*, Praefare, London, 2003, 26.

⁴ Saparudin mendefinisikan ideologi keagamaan adalah sekumpulan norma atau nilai yang dirumuskan berdasarkan ajaran agama yang disusun secara sistematis yang dijadikan justifikasi atau legitimasi tindakan atau perilaku beragama tertentu untuk membangun, menyebarkan dan memperkuat eksistensinya. Saparudin, *Ideologi Keagamaan Dalam Pendidikan: Diseminasi dan Kontestasi pada Madrasah dan Sekolah Islam di Lombok*, Disertasi, UIN Jakarta, Onglam Books, Jakarta, 2017, 63.

⁵ Isitilah *apparatus* dikenalkan Louis Althusser yang merepresentasikan orang yang bekerja sebagai produk dan produsen sekaligus dari ideologi yang dikembangkan. Louis membedakan apparatus kedalam dua katagori, yaitu *Repressive State Apparatus* (RSA) yang diwakili pemerintah dengan semua perangkatnya. Yang kedua adalah *Ideological State Apparatus* (ISA) yaitu agama, Pendidikan, perusahaan, keluarga, media, literatur, partai dan sebagainya. Jika RSA bekerja dengan hak imperative atau memaksa dan bisa jadi menggunakan kekerasan, maka ISA bekerja dengan desiminasi ideologi dan kadang menggunakan kekerasan-bahkan bisa lebih berbahaya. Louis Althusser *Ideology and Ideological State Apparatuses*, Source: Lenin and Philosophy and Other Essays, Monthly Review Press, 1971. Althusser mendefinisikan ideologi sebagai *Ideology represents the imaginary relationship of individuals to their real conditions of existence*. Ideologi adalah representasi hubungan imajiner dari individu terhadap eksistensi dari kondisi realitas. Althusser menjelaskan bahwa semua ideologi mewakili dalam distorsi imajiner yang seharusnya antara hubungan produksi yang ada dengan semua hubungan (imajiner) individu yang terlibat atau sengaja dilibatkan. Karena itu apa yang direpresentasikan dalam ideologi bukanlah sistem hubungan nyata tempat mereka hidup. Althusser juga menjelaskan bahwa ideologi bertindak dan berfungsi sedemikian rupa sehingga merektur subye di antara individu (bisa merekrut mereka semua), atau mengubah individu menjadi subjek (mengubah mereka semua menjadi apparatus) dengan operasi yang tepat, yang kemudian disebut interpelasi atau memanggil. Ini artinya Ideologi melakukan perekrutan kepada individu secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai alat/wahan/saluran (pendidikan salah satunya) dengan tujuan agar mereka menjadi kader atau apparatus bagi ideologi itu sendiri. Tentu rekrutmen individu tersebut dilakukan oleh sekelompok orang bahkan negara melalui saluran-saluran yang ada. Disini menunjukkan subjek yang melakukan rekrutmen individu bekerja sebagai produsen dan sekaligus produk dari apparatus ideologi itu sendiri. Baca juga *In Literary Theory: An Anthology*, second edition, edited by Julie Rivkin and Michael Ryan, Maiden USA, Blacwell Publishing, 2004, 693-695 dalam Saparudin *Ideologi Keagamaan Dalam Pendidikan: Diseminasi dan Kontestasi pada Madrasah dan Sekolah Islam di Lombok*, Disertasi, UIN Jakarta, Onglam Books, Jakarta, 201, 82.

⁶ Identitas yang ingin dibangun melalui pendidikan yang dikembangkan oleh JSIT adalah model muslim yang baik versi salafi. Dan penguatan identitas sebagai seorang muslim dengan atribut pakaian, bahasa, tatacara beribadah, cara berpikir, cara berperilaku yang disesuaikan dengan ideologi Salafi. Wacana “Syar’i”, “Hijrah”, “Islamisme” menjadi model narasi yang dikembangkan di ruang public. Peneliti mengidentifikasi sedikitnya ada empat strategi yang dikembangkan oleh gerakan Salafi di Indonesia. Pertama melalui penguasaan wacana “persepsi muslim yang baik” yaitu frame muslim Indonesia yang baik adalah yang syar’i, berhijrah, hafal Qur’an atau minimal beberapa juz atau ayat, performance pakaian, cara berkomunikasi dan wacana-wacana agamis lainnya. Kedua, melalui penguasaan media sosial dan berita *on line* Wacana keagamaan dengan mudah di sajikan kepada halayak terkait wacana Islamisme dan tata aturan kehidupan yang di klaim syar’i. Ketiga melalui Pendidikan, memanfaatkan sebab pemerintah yang memberikan kesempatan (*opportunity structural*) kepada Salafi untuk mengembangkan Pendidikan. Sekolah menjadi *marketing ideology* untuk membangun kader, simaptisan yang telah terdoktrin dengan ideologi salafi. Yang ketiga ini disebut membangun *apparatus ideology*. Masuk ke semua lini komunitas masyarakat. Kader-kader yang militan yang telah memahami doktri salafi dan wacana “islamisme” melakukan penetrasi ke seluruh komunitas atau jaringan atau elemen masyarakat dengan cara yang santun, menyentuh dan melayani. Baca juga Bassam Tibbi, *Islam dan Islamisme*, 2016.

⁷ Michael W. Apple, *Ideology and Curriculum*, New York, Taylor and Francis e-Library, 2002.

⁸ *Structural opportunity* dikenalkan oleh Ken Robert dalam Jurnal Education and Work 14 Desember 2009, 1. Structural opportunity adalah bentuk dari hubungan antar keluarga, pendidikan, kebutuhan pasar. Sera keterkaitan social lainnya, etnisitas, proses pengautan pasar kerja, yang memberikan pengaruh. Dalam penelitiannya, Ken memfokuskan pada adanya kesempatan yang terbuka secara structural atau dibukakan oleh penguasa dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Peneliti meminjam istilah ini untuk menggambarkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan terbuka untuk mendirikan sekolah formal kepada masyarakat manapun dengan mengadopsi kurikulum nasional. Sementara muatan ideologis dari setiap lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat, tidak mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Hal inilah yang oleh peneliti disebutkan sebagai kesempatan structural yang dimanfaatkan oleh kelompok keagamaan untuk menguatkan basis ideologis keagamaan masing-masing dan sekaligus mendesiminasikan ideologi keagamaan kepada generasi yang akan datang.

⁹ Charlene Tan, *Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia*, New York: Routledge, 2011, 1

¹⁰ Michael W. Apple, *The Politic of Knowledge: Does a National Curriculum Make Sense?*, *Discourse*, vol 14. No. 1, 1993, 1.

¹¹ Louis Althusser, *On The Reproduction of Capitalisme Ideology and Ideological State Apparatuses*, London: Verso, 1971, 233.

¹² Saparudin, *Ideologi Keagamaan*, 205.